

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Dunia secara global sedang melawan pandemi dari sebuah varian *coronavirus*. Jenis varian baru dari *coronavirus* ini dinamakan sebagai SARS-Cov-2, yang pertama kali dilaporkan dan ditemukan di Wuhan, provinsi Hubei, China, pada Desember 2019. Infeksi dari SARS-Cov-2 menyebabkan penyakit yang dinamakan sebagai COVID-19 oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai lembaga kesehatan dunia (Koley & Dhole, 2020: 1-3). Tiongkok sendiri sejak awal Januari 2020, secara rutin telah melaporkan kepada WHO terkait dengan kasus COVID-19. Kasus-kasus COVID-19 yang mulai banyak ditemukan pada negara-negara di Dunia telah membuat WHO untuk melakukan pemantauan terkait pada perkembangan kasus COVID-19 di seluruh negara (Susanti, 2020: 17).

Penanganan COVID-19 di Indonesia sendiri telah berlangsung sejak bulan Januari 2020, pada saat informasi pandemi di Wuhan sudah mulai menyebar. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Indonesia telah mulai melakukan rapat serta diskusi tentang pandemi yang akan masuk ke Indonesia. Melalui Surat Edaran (SE) B.5/51/AS.02.02/I/2020 tentang Kewaspadaan Penyebaran Penyakit Pneumonia Berat Yang Tidak Diketahui Penyebabnya pada Pekerja, Kemenaker telah meminta pendataan terkait kasus *pneumonia* berat, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan pada kasus *pneumonia* yang terjadi di tempat kerja, dengan melakukan pola hidup bersih (BNPB, 2020: 121). Pada tanggal 16 Oktober 2021 kasus COVID-19 yang telah terjadi di Dunia telah mencapai angka terkonfirmasi 239.437.517 kasus, di Indonesia sendiri kasus COVID-19 telah mencapai angka 4.234.011 dengan 18.774 kasus aktif per tanggal 16 Oktober 2021 (covid19.go.id).

Kasus COVID-19 yang terus meningkat seiring berjalannya waktu, telah membuat berbagai negara di seluruh Dunia untuk menciptakan inovasi-inovasi yang berfokus pada penanganan pandemi COVID-19. Salah satu inovasi yang menjadi penemuan pada masa pandemi COVID-19 adalah terkait COVID-19 *contact trace app*. Penemuan aplikasi yang berbasis pada mobile ini telah

membawa dampak yang cukup signifikan dalam melakukan *tracing* COVID-19 di suatu negara. Teknologi *surveillance* ini menggunakan sistem sensor lokasi, untuk mengetahui di mana pengguna berada dan melakukan interaksi dengan siapa. *TraceTogether* merupakan aplikasi *tracing* pertama yang di implementasikan oleh singapore, dengan menggunakan teknologi *Bluetooth* aplikasi ini memungkinkan untuk memberikan data terkait detail kedekatan hingga durasi interaksi antar pengguna melalui perangkat yang telah memiliki aplikasi *TraceTogether* (Abbas & Michael, 2020: 1-2).

Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 juga telah bergerak cepat untuk membuat *contact trace app*, sehingga memudahkan dalam melakukan *tracing* terhadap masyarakat yang terpapar COVID-19. Indonesia melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Menteri Nomor 253 Tahun 2020 menetapkan aplikasi PeduliLindungi sebagai aplikasi yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan *surveillance* kesehatan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 (Putri & Hamzah, 2021:68-69). Aplikasi PeduliLindungi digunakan oleh Pemerintah untuk melaksanakan surveilans kesehatan, yakni dengan melakukan penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*), dan serta pemberian peringatan (*warning* dan *fencing*). Pengguna sendiri melakukan pengisian data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi yang meliputi pada nama, alamat dan nomor ponsel aktif. Aplikasi PeduliLindungi akan meminta pengguna untuk selalu mengaktifkan lokasi dan melakukan *scan barcode* pada suatu tempat, untuk memudahkan aplikasi dalam merekam informasi terkait aktivitas yang dilakukan oleh pengguna aplikasi (Olivia, dkk., 2020: 2). Aplikasi PeduliLindungi pada tanggal 30 juli 2020 dilansir dari Kominfo (2020) memiliki total pengguna sebanyak 4 Juta Jiwa atau sekitar 5% dari total pengguna dari *smartphone* di Indonesia.

PeduliLindungi melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 yang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan kemudian diubah menjadi Keputusan Menteri Nomor 253 Tahun 2020 tentang penetapan aplikasi pedulilindungi dalam rangka pelaksanaan surveilans kesehatan penanganan corona virus *disease* 2019 (COVID-19) menetapkan aplikasi PeduliLindungi sebagai aplikasi yang digunakan

pemerintah dalam melaksanakan *surveillance* kesehatan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 (Putri & Hamzah, 2021:68-69). PeduliLindungi yang dalam kebijakannya diwajibkan sebagai cara untuk *surveillance* kesehatan, akan tetapi masyarakat memiliki kecenderungan dalam menggunakan aplikasi PeduliLindungi sehingga terjadi kontrol dalam masyarakat melalui aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi sendiri dalam penggunaannya mengharuskan pengguna untuk memberikan akses pada lokasi, kamera, dan tempat penyimpanan. Akses data informasi para pengguna PeduliLindungi akan dikirim langsung kepada Telkom Indonesia, sehingga telah membawa kekhawatiran bagi pengguna terkait berkembangnya metode otoritarianisme digital dalam menangani pandemi COVID-19 melalui aplikasi PeduliLindungi (Lin, dkk., 2020: 4).

Indonesia telah melaksanakan *surveillance* kesehatan berbasis pada aplikasi dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Di Jakarta sendiri menggunakan PeduliLindungi secara masif dilakukan di berbagai tempat yang dapat menciptakan kerumunan. PeduliLindungi bekerja sebagai sistem *Safe Enterance* berkolaborasi dengan Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) melalui Keputusan Gubernur No. 1026 Tahun 2021, di mana dalam aplikasi JAKI sendiri tersedia Nomor Induk Kependudukan (NIK) pengguna yang telah terintegrasi langsung dengan aplikasi PeduliLindungi. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang diwajibkan oleh Pemerintah DKI Jakarta pada tempat-tempat seperti pusat perbelanjaan hingga tempat *essential*. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang diwajibkan, telah membawa pada kekhawatiran di masyarakat khususnya pada masyarakat DKI Jakarta. Hal ini didasari bahwa terdapat akses khusus terhadap data informasi pengguna aplikasi PeduliLindungi yang akan dikirimkan kepada Telkom Indonesia, yang dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran HAM akibat dari penggunaan sistem otoritarianisme digital untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia (Lin, dkk., 2020: 4).

Pandemi COVID-19 telah membawa negara-negara di dunia untuk melakukan tindakan-tindakan otoritarianisme, khususnya kepada otoritarianisme digital dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Otoritarianisme digital sendiri memiliki pengertian bahwa penggunaan teknologi yang dilakukan oleh pemerintahan rezim otoritarian, teknologi digunakan bukan hanya untuk

melakukan kontrol terhadap warga negara, tetapi juga digunakan untuk membentuk perilaku warga negara melalui pengawasan, penindasan, manipulasi, penyensoran, dan penyediaan layanan dalam mempertahankan dan memperluas kontrol politik (newamerica.org). Otoritarianisme digital bukan hanya dilakukan rezim otoriter untuk melakukan sensor konten-konten yang berada di ranah digital, akan tetapi juga meliputi pada pengawasan terhadap individu melalui perangkat digital yang meliputi pada, penggunaan kamera, *facial recognition*, *drone*, pelacakan GPS dan teknologi berbasis digital lainnya, sehingga *Mass Surveillance* yang dilakukan dalam Otoritarianisme Digital telah menghilangkan etintias dari *privacy* masyarakat itu sendiri (Khalil, 2020: 6).

Otoritarianisme digital dipergunakan untuk menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar, yang dapat diakses serta dianalisis oleh negara untuk membentuk dan mengendalikan masyarakat. *Big Data* yang telah dikumpulkan oleh rezim otoriter memiliki fungsi tambahan yaitu, dengan melakukan integrasi untuk pengembangan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) yang dapat dipergunakan untuk memantau keberadaan dari individu serta perilaku individu di ranah digital (Khalil, 2020: 7). Tiongkok sendiri telah memperkenalkan model otoritarian digital yang dipergunakan untuk melakukan *Mass Surveillance* kepada masyarakat tiongkok. Teknologi digunakan oleh rezim otoriter Tiongkok untuk melakukan pengawasan sehingga memudahkan dalam melakukan *social scoring system* yang telah diterapkan Tiongkok dalam melakukan kontrol di tengah masyarakat (wired.co.uk). Tiongkok tidak hanya menerapkan otoritarianisme digital untuk mempertahankan kekuasaan pada rezim, tetapi dipergunakan juga dalam penanganan pandemi COVID-19. Teknologi pengawasan tiongkok telah dianggap sebagai hal yang efektif dalam mengatasi penyebaran COVID-19 di masyarakat, di mana hal ini telah menarik minat pasar global untuk melakukan penerapan pada teknologi otoritarianisme digital yang dimiliki oleh Tiongkok dalam mengatasi pandemi (csis.org). Tiongkok melalui kerjasama dengan perusahaan Alibaba, meluncurkan *Health QR Code* yang diakses melalui alipay (insider.com). *Health QR Code* yang digunakan oleh Tiongkok dalam mengatasi pandemi COVID-19, menerapkan warna-warna terhadap pengguna yaitu hijau, kuning, dan merah. Sistem *Health QR Code* sendiri, melakukan pengumpulan data

dari pengguna berupa *id card*, alamat tempat tinggal, data vaksinasi serta data tes PCR, dan juga informasi perjalanan (mencakup kepada destinasi, mode perjalanan, penginapan, hingga riwayat perjalanan) (Cheng, dkk., 2021: 5).

Pelanggaran privasi data pengguna tidak hanya dilakukan oleh Tiongkok dalam mengatasi penyebaran pandemi *COVID-19* melalui aplikasi *mass surveillance contact tracing app*, tetapi hal ini juga terjadi dan dilakukan oleh negara-negara di dunia salah satunya adalah Indonesia melalui PeduliLindungi. PeduliLindungi memiliki model sistem yang sama dengan Health QR Code, di mana masyarakat diwajibkan untuk menyalakan GPS pada smartphone untuk meningkatkan akurasi dari pengguna, yang dalam penelitian Pallaeon Lin (2020) ditemukan bahwa PeduliLindungi meminta beberapa izin lokasi yang meliputi *access\_background\_location*, *access\_coarse\_location*, dan *access\_fine\_location*. Melalui izin lokasi yang diberikan oleh pengguna dan kewajiban pengguna untuk menggunakan PeduliLindungi dalam melakukan akses tempat-tempat publik, telah membuat perilaku masyarakat telah dikontrol melalui PeduliLindungi. Dilansir dalam COVID-19.go.id (2021) PeduliLindungi membedakan pengguna berdasarkan warna yaitu hitam yang menandakan kontak erat atau terinfeksi COVID-19, merah merupakan pengguna yang belum melakukan vaksinasi, kuning menandakan bahwa pengguna baru melakukan vaksin dosis pertama, dan hijau menandakan bahwa pengguna telah melakukan vaksinasi secara lengkap serta tidak ada kontak dengan virus COVID-19 (covid19.go.id, 2021). Penggunaan warna dalam melakukan identifikasi kepada masyarakat telah menjadikan pemerintah melalui aplikasi PeduliLindungi sebagai teknologi yang melakukan kontrol terhadap tindakan yang terjadi dimasyarakat, determinisme teknologi yang terjadi kepada masyarakat telah merubah pola dari perilaku masyarakat untuk mematuhi warna-warna yang tertanam pada aplikasi PeduliLindungi pengguna. Dilansir dari salah satu akun twitter menyebutkan keluhan bahwa:

dutt [@cute\_88]. (2022, Maret 5). Aneh banget peraturan kantor antigen negatif sudah disuruh untuk masuk, tetapi status pedulilindungi masih hitam, nyusahin mau kemana-mana harus scan PeduliLindungi [Tweet]. Twitter. [https://twitter.com/cutte\\_88/status/1500036895908466688](https://twitter.com/cutte_88/status/1500036895908466688)

Melalui cuitan dari laman twitter @cute\_88, bahwa hegemoni kesadaran yang terjadi melalui aplikasi PeduliLindungi telah merubah kesadaran dari masyarakat

untuk patuh dan tunduk terhadap peraturan dari negara, yang di mana fenomena ini menjadikan bahwa teknologi telah membentuk kesadaran individu dalam berbagai hal yang menurut McLuhan sebagai determinisme teknologi (Nurudin, 2009: 186). Melalui PeduliLindungi, masyarakat yang terpapar oleh virus COVID-19 dapat dianalogikan menjadi terpenjara oleh teknologi dari PeduliLindungi. Oleh karena itu, perlu dilihat sebagai fenomena keterlambatan data ataupun sebagai kontrol dari negara.

Pandemi COVID-19 telah membawa kepada peningkatan otoritarianisme digital melalui aplikasi pengawasan yang dipergunakan untuk mengetahui jejak pengguna aplikasi, sehingga memudahkan dalam menekan penyebaran virus yang terjadi (nbcnews.com) . Keberhasilan penanganan COVID-19 melalui *mass surveillance* telah membuat negara-negara di dunia untuk menerapkan teknologi otoritarian digital, seperti di Indonesia melalui aplikasi pengawasan PeduliLindungi. Pengawasan berbasis pada aplikasi *smartphone* digunakan oleh berbagai negara di dunia dalam menangani penyebaran COVID-19. Indonesia dengan PeduliLindungi, Brunei dengan BruHealth, dan Laos dengan laoKYC merupakan aplikasi yang digunakan oleh negara-negara tersebut dalam melakukan pengumpulan hingga menyimpan data dari pengguna. Informasi yang telah dikumpulkan dari aplikasi *surveillance* ini, akan disimpan dalam *database* pemerintah, di mana dalam penjelasannya masyarakat tidak dapat mengetahui tentang siapa yang dapat memiliki akses informasi dari *database* dan penyimpanan informasi ini juga tidak memiliki rentang waktu serta batas waktu penyimpanan (Asia Center, 2020: 26-27).

PeduliLindungi sebagai aplikasi *tracing* memiliki akses terhadap *smartphone* pengguna lebih banyak dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi serupa di negara lain, seperti *TraceTogether* dari Singapore. *TraceTogether* sendiri meminta izin pengguna untuk mendapatkan akses terhadap lokasi, hal ini berbeda dibandingkan dengan PeduliLindungi yang harus sampai melakukan akses kepada kamera hingga penyimpanan dari *smartphone* pengguna. Dalam penelitian yang dilakukan oleh *The Citizen Lab* dari Universitas Toronto, ditemukan bahwa aplikasi PeduliLindungi meminta izin akses pengguna yang di mana hal ini sangat berbahaya bagi *privacy* pengguna aplikasi (Lin, dkk., 2020: 19). WHO dalam mengatur penggunaan aplikasi *tracing*, membatasi pada *data minimization*, di mana

aplikasi tidak boleh mengumpulkan data yang tidak terkait pada informasi *contact tracing*. Pada aplikasi PeduliLindungi, akses terhadap kamera serta penyimpanan *smartphone* telah melanggar *data minimization* yang diatur oleh WHO (Ibid.).

Ketakutan terhadap aplikasi PeduliLindungi yang memiliki akses berlebihan terhadap *smartphone* pengguna adalah terkait pada *Mass Surveillance*. Metode Tiongkok yang menerapkan otoritarianisme digital telah membawa ketakutan bagi masyarakat di Indonesia, di mana informasi yang didapatkan oleh PeduliLindungi dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kepentingan yang lain. Bahkan data yang tersimpan pada *database* aplikasi PeduliLindungi ada kemungkinan untuk mengalami kebocoran sehingga dapat diakses oleh pihak ketiga. Damar Juniarto direktur eksekutif SAFEnet menyampaikan bahwa masyarakat hanya perlu untuk memberikan akses lokasi apabila berada dalam tempat-tempat publik, ketika berada dirumah tidak perlu untuk memberikan izin akses lokasi, hal ini didasari kepada kenyataan bahwa aplikasi PeduliLindungi yang mengabaikan tiga prinsip perlindungan privasi yakni *privacy by design*, *privacy by standard*, dan *data protection impact assessment* (suara.com).

Akses yang dilakukan oleh PeduliLindungi terhadap *smartphone* pengguna tidak berdasarkan kepada penggunaan yang efektif dan terlalu berlebihan. Seperti kepada PeduliLindungi yang dapat mengetahui *geolocation coordinate* pengguna sehingga dapat mengetahui *contact tracing* pengguna aplikasi. Di mana hal ini patut dipertanyakan karena terdapat metode *Bluetooth* yang dapat melakukan deteksi terhadap pengguna PeduliLindungi yang saling berdekatan, termasuk dapat melakukan deteksi kerumunan serta pasien positif COVID-19 (Lin, dkk., 2020: 19).

Otoritarianisme digital yang berkembang pesat pada saat pandemi COVID-19, hal ini didasari kepada keberhasilan Negara Tiongkok dalam mengatasi penyebaran COVID-19 melalui *Mass Surveillance* yang dilakukan oleh rezim otoriter. Tiongkok dalam melakukan penanganan pandemi COVID-19 bekerjasama dengan *Alipay* dan *WeChat* untuk menerbitkan *Health Code*, yang dapat melihat data perjalanan pengguna untuk sehingga dapat meminimalisirkan penyebaran COVID-19 (Liang, 2020: 1-2). Melalui Keberhasilan yang terjadi telah membawa arus otoritarianisme digital kepada negara-negara demokrasi. Penerapan aplikasi pengawasan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 telah mengharuskan

negara-negara untuk bergerak cepat dalam memutuskan kebijakan khususnya pada sejauh mana *privacy* dari masyarakat pada saat pandemi. PeduliLindungi yang diterapkan Indonesia telah membantu Indonesia, khususnya pada Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang tengah melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk dapat melakukan kontrol pada tempat-tempat *essential*. Aplikasi PeduliLindungi sendiri menurut Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Bapak Rinaldy mengatakan bahwa sistem pelacakan kontak dalam aplikasi PeduliLindungi aman digunakan untuk publik, hal ini didasari pada tiga sistem pengamanan, yaitu pengamanan pada infrastruktur, data, dan aplikasi (suara.com).

Pelacakan kontak seperti pada aplikasi PeduliLindungi sangatlah dibutuhkan dalam mengatasi penyebaran COVID-19, akan tetapi aplikasi tersebut datang dengan akses-akses terhadap informasi personal pengguna aplikasi. Informasi personal seperti lokasi dan informasi kesehatan sangat penting dan dibutuhkan dalam melakukan deteksi terhadap kluster-kluster infeksi virus COVID-19, sehingga dapat dilakukan karantina secara cepat dan terukur. Aplikasi *contact tracing* sendiri harus mengedepankan hak privasi pengguna sehingga tidak menjadi perkembangan otoritarian digital yang semakin meluas (Ocheja, dkk., 2020: 9-10).

Melalui keberhasilan pada penanganan pandemi COVID-19 di negara-negara yang menerapkan aplikasi *contact tracing*, khususnya oleh negara Tiongkok. Keberhasilan metode *mass surveillance* telah melewati batas-batas privasi masyarakat yang harus dikorbankan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Dari Pandemi COVID-19 telah memulai kebangkitan otoritarianisme digital, Tiongkok telah memulai program berbasis otoriter sebelumnya melalui sistem *skynet* dengan dalih *smart city*, dimana *skynet* mengumpulkan interaksi masyarakat melalui *geographic information system (GIS)* untuk meningkatkan pengawasan secara *real-time* (Khalil, 2020: 10). Model-model otoritarianisme digital seperti di Tiongkok telah meluas menjadi sebuah model aplikasi berbasis kesehatan, seperti PeduliLindungi dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat dengan data yang diperoleh secara *real-time*. Dilansir dalam kompas.com (2021) bahwa pada bulan Oktober 2021, PeduliLindungi dapat diakses melalui Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka, Tiket.com, DANA, Cinema XXI, LinkAja, Jaki, Livin'by Mandiri,



GOERS. Dari 11 aplikasi yang dapat melakukan akses terhadap PeduliLindungi sendiri tidak terdapat aplikasi kesehatan, akan tetapi aplikasi yang berbasis kepada *e-commerce* hingga pada *entertainment*, yang di mana sebelas perusahaan ini akan terbantu dalam meningkatkan kualitas dari produk yang mereka miliki, hal ini didasari pada fakta bahwa adanya kewajiban pengguna untuk menyalakan GPS pada *smartphone*, sehingga data perjalanan dari pengguna dapat diketahui juga oleh 11 aplikasi yang bekerjasama dengan PeduliLindungi.

Kenyataannya aplikasi *contact tracing* seperti PeduliLindungi sangat berbahaya bagi privasi masyarakat, karena telah termasuk kepada *mass surveillance* yang merupakan bagian dari Otoritarianisme digital. Jakarta menerapkan aplikasi PeduliLindungi sebagai sebuah kewajiban, dan masyarakat untuk dapat beraktivitas secara normal diharuskan untuk memiliki dan mendaftarkan pada aplikasi PeduliLindungi, sebagai syarat untuk menunjukkan data vaksinasi dan menghindari terjadinya kerumunan. Kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi, telah membuat masyarakat menjadi *data is labor*, di dimana data yang bekerja dalam hal ini masyarakat untuk melakukan akses terhadap PeduliLindungi. Aplikasi berbasis pada pengawasan kesehatan di masyarakat mengalami perdebatan panjang ketika diterapkan kepada negara-negara berbasis demokrasi.

Terdapat penelitian terdahulu yang telah menjelaskan terkait meningkatnya pola otoritarianisme khususnya otoritarianisme digital dalam penanganan pandemi *COVID-19*. Penelitian pertama yang menjadi bahan referensi dari penelitian penulis adalah karya dari Pallaeon Lin, Jeffrey Knockel, Irene Poetranto, Stephanie Tran, Justin Lau, dan Adam Senft tahun 2020 yang berjudul, “**Unmasked II: An Analysis of of Indonesia and the Philippines Government launched COVID-19 Apps**”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam aplikasi PeduliLindungi mengumpulkan data *WIFIMAC* dan alamat IP Lokal pengguna yang dimana fitur tersebut merupakan bukanlah fungsi yang dibutuhkan oleh aplikasi *contact tracing* dalam melaksanakan fungsinya. Berbanding dengan aplikasi *contact tracing StaySafe PH* yang digunakan oleh Filipina juga memiliki kerentanan data pengguna yang dapat diakses oleh orang lain. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa aplikasi PeduliLindungi yang mengirimkan koordinat pengguna sangatlah tidak

dibutuhkan, dan dapat disalahgunakan sehingga dalam penelitiannya memberikan saran untuk menggunakan *Bluetooth* dalam melakukan pengoperasian PeduliLindungi. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian ini melihat dari sudut pandang sistem PeduliLindungi bekerja tanpa melihat dari faktor-faktor yang berperan seperti ancaman yang akan menghasilkan kepada otoritarian. Penelitian ini memberikan argumentasi bahwa terdapat pelanggaran privasi yang dilakukan oleh aplikasi *contact tracing* (Lin, dkk., 2020). Penelitian yang membandingkan antara penggunaan aplikasi *contact tracing* di Indonesia dan Filipina ini masih belum lebih dalam melihat fenomena otoritarianisme digital yang berkembang saat penanganan COVID-19, sehingga dalam penelitian penulis akan membahas secara lebih jauh terkait perkembangan otoritarianisme digital yang berkembang dalam penanganan COVID-19.

Penelitian selanjutnya adalah jurnal ilmiah kualitatif karya Denidah Olivia, Sinta Dewi Rosadi, dan Rika Ratna Permata tahun 2020 yang berjudul **“Perlindungan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Aplikasi Surveilans Kesehatan PeduliLindungi dan COVIDSAFE di Indonesia dan Australia”**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya pengadopsi aturan dari Australia tentang pemberian sanksi kepada data pribadi yang disalah gunakan yang terdapat pada aplikasi surveilans kesehatan pasca pandemi berakhir, hal tersebut belum diterapkan oleh Aplikasi PeduliLindungi di Indonesia, sehingga akan sangat rawan untuk penyalahgunaan data pribadi yang tersibat dalam *database* aplikasi. Penelitian dari Olivia (2020) tentang komparasi yang dilakukan antara aplikasi PeduliLindungi di Indonesia dengan aplikasi *covidsafe* di Australia, akan membantu penelitian dari penulis, karena komparasi yang dilakukan oleh penelitian olivia menemukan fakta bahwa, masih kurangnya perlindungan data pribadi yang terjadi di Indonesia. Penerapan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai sebuah kewajiban, maka hal tersebut akan cukup beresiko dalam permasalahan data pribadi masyarakat. Menariknya dalam penelitian ini adalah menemukan bahwa australia telah memiliki aturan terkait perlindungan privasi individu yang diatur dalam *Privacy Act*. Sehingga otoritarianisme yang kemungkinan terjadi pasca diberlakukannya aplikasi *contact tracing* dapat dikurangi (Olivia, dkk., 2020). Berbeda dengan penelitian penulis, penelitian olivia dan kawan-kawan lebih

melihat bahwa perlu adanya perlindungan data pribadi sedangkan penelitian dari penulis melihat bahwa aplikasi PeduliLindungi sebagai bentuk pertahanan dari negara, sehingga perlindungan data pribadi yang seharusnya dilakukan oleh negara tidak terlaksanakan karena terdapat politik tubuh untuk menjaga stabilitas.

Penelitian selanjutnya adalah, jurnal ilmiah kuantitatif yang ditulis oleh Agnieszka Golec de Zavala, Kinga Bierwiazzonek, Tomasz Baran, dan Oliver Keenan tahun 2021 dengan judul **“The COVID-19 Pandemic, Authoritarianism, and Rejection of Sexual Dissenters in Poland”**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan perilaku terhadap ancaman yang terjadi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat penolakan terhadap pembangkang sehingga menimbulkan sifat dari otoritarianisme serta keinginan untuk kohesi nasional, hal ini merupakan sejalan dengan teori otoritarianisme sebagai respon terhadap ancaman. Dalam penelitian ini ditemukan juga terdapat hubungan antara meningkatnya ancaman penyakit menular dengan peningkatan otoritarianisme. Penelitian kuantitatif ini menemukan bahwa terdapat perbedaan antara sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19, dimana saat terjadinya pandemi COVID-19 kecenderungan untuk memiliki sifat otoritarianisme sangat tinggi, hal ini diakibatkan dari reaksi pertahanan kepada ancaman yang ada. Perbedaan antara penelitian Golec de Zavala dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa masyarakat tidak secara penuh menerima otoritarianisme yang dimiliki oleh aplikasi *surveillance* kesehatan, sedangkan dalam penelitian Zavala masyarakat memiliki kecenderungan menerima sifat otoritarianisme dalam kebijakan-kebijakan untuk menjaga stabilitas di masyarakat (Golec de Zavala, dkk., 2021). Sehingga penulis akan melihat lebih jauh terkait juga bahaya dari otoritarianisme khususnya otoritarianisme digital yang dilakukan oleh negara dalam respon pertahanan terhadap pandemi COVID-19.

Penelitian selanjutnya adalah, jurnal yang ditulis oleh Roba Abbas dan Katina Michael tahun 2020 berjudul, **“COVID-19 Contact Trace App Deployments: Learnings from Australia and Singapore”**. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aplikasi *Contact Tracing* sendiri sangat tidak efektif untuk orang-orang yang tidak menunjukkan gejala COVID-19, dan terus berada di tempat keramaian sehingga memungkinkan untuk menularkan virus kepada orang

lain. Penelitian ini menemukan terdapat tantangan aplikasi *Contact Tracing* yaitu pada perlindungan data dan privasi. Penelitian ini juga memberikan argumentasi bahwa data yang diterima oleh aplikasi *Contact Tracing* tidak sepenuhnya aman, akan tetapi dengan gagasan bahwa “*Health comes first*” menjadikan masyarakat untuk mendahulukan kesehatan diatas dari kebebasan dan perlindungan data masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Abbas dan Michael menunjukkan bahwa masyarakat cenderung untuk melakukan perintah otoritas disaat sedang terancam, yang dalam hal ini merupakan ancaman dari pandemi (Abbas & Michael, 2020). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam melihat aplikasi *Contact Tracing*, bahwa sifat pertahanan otoritarian di masyarakat akan membawa kepada kebijakan-kebijakan otoritarian pada negara demokrasi, sehingga menyebabkan ketidakpedulian masyarakat dengan perkembangan aplikasi *mass surveillance* yang cukup membahayakan ini. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abbas dan Michael terhadap penelitian penulis adalah, penulis akan melihat penerapan Aplikasi PeduliLindungi yang lebih mengedepankan “*Health come first*” sehingga menimbulkan kepada faktor-faktor dari otoritarianisme digital.

Penelitian selanjutnya adalah dari Natalie Ram dan David Gray pada tahun 2020, yang berjudul “**Mass Surveillance in the Age of COVID-19**”. Hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa Amerika Serikat yang memiliki Amandemen keempat konstitusi yang berisi pelarangan dan penyitaan tanpa alasan, harus menerapkan *digital contact tracing* untuk mengatasi pandemi. Penelitian ini melihat bahwa terdapat kecenderungan eksekutif dan legeslatif untuk memiliki otoritas dalam melakukan pengembangan *contact tracing*, dengan doktrin “*Special needs*” sehingga amandemen keempat koosntitusi Amerika Serikat tidak digunakan dalam pembuatan *digital contact tracing*. Penelitian ini melihat terdapat resiko yang dihadapi oleh masyarakat ketika menggunakan aplikasi *contact tracing*, di mana dapat berdampak kepada privasi. Penelitian yang dilakukan oleh Ram dan Gray menunjukkan bahwa dalam melakukan *digital contact tracing* terdapat aturan-aturan tentang privasi pengguna yang dilanggar oleh aplikasi tersebut (Ram & Gray, 2020). Melalui hal ini penulis melihat bahwa *force majeure* seeperti pandemi COVID-19, telah memaksa negara-negara demokrasi untuk menciptakan sistem otoritarian dalam melakukan pertahanan untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Penelitian

Natalie Ram dan David Gray memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang akan membahas melalui sudut pandang bahwa kehadiran digital otoritarianisme merupakan hal yang nyata, dan hal tersebut hadir ketika negara sedang dalam melakukan pertahanan melawan pandemi. Sehingga penelitian penulis akan melihat aplikasi PeduliLindungi sebagai “*special needs*” yang harus diterapkan oleh negara biarpun hal tersebut memiliki sifat-sifat dari otoritarianisme.

Berbeda dengan kelima penelitian terhadulu, dalam penelitian ini penulis akan melihat fenomena dari otoritarianisme digital yang dilakukan oleh negara melalui sistem pertahanan otoritarianisme dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan melihat dari penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Meningkatnya fenomena otoritarianisme sebagai bentuk pertahanan dalam ancaman pandemi COVID-19, membuat penulis melakukan penelitian yang secara komperhensif melihat fenomena otoritarianisme digital melalui aplikasi *contact tracing* dengan melihat fenomena *mass surveillance* yang terjadi pada aplikasi PeduliLindungi serta melihat adanya Deteriminisme Teknologi yang dilakukan oleh negara dalam menciptakan dan kontrol di masyarakat melalui penarapan penerapan dari aplikasi PeduliLindungi.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Aplikasi PeduliLindungi merupakan aplikasi berbasis kepada *tracing* masyarakat untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19. Aplikasi PeduliLindungi digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan surveilans kesehatan, yakni dengan melakukan penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*), dan serta pemberian peringatan (*warning* dan *fencing*). Pelacakan kontak seperti pada aplikasi PeduliLindungi sangatlah dibutuhkan dalam mengatasi penyebaran COVID-19, akan tetapi aplikasi tersebut datang dengan akses-akses terhadap informasi personal pengguna aplikasi. Informasi personal seperti lokasi dan informasi kesehatan sangat penting dan dibutuhkan dalam melakukan deteksi terhadap kluster-kluster infeksi virus COVID-19, sehingga dapat dilakukan karantina secara cepat dan terukur. Aplikasi *contact tracing* seperti PeduliLindungi harus terdapat hak privasi pengguna sehingga tidak menjadi perkembangan otoritarian digital yang semakin meluas.

Keberhasilan negara Tiongkok dalam menangani penyebaran COVID-19 melalui sistem *Mass surveillance* yang diterapkan oleh rezim Otoriter Tiongkok, telah membawa negara-negara untuk memutuskan memberlakukan penggunaan aplikasi pengawasan *contact tracing*, yang dalam kasus di Indonesia adalah PeduliLindungi berdasarkan pada latar belakang yang ada, maka penulis menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana otoritarianisme digital berkembang dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan melihat penggunaan aplikasi PeduliLindungi?”**

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, maka penulis mengharapkan pada tercapainya tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisa bagaimana Otoritarianisme berkembang pada masa pandemi COVID-19 dengan melihat fenomena otoritarianisme di Indonesia melalui penerapan aplikasi PeduliLindungi.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibagi atas dua hal yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

- **Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana otoritarianisme digital berkembang pada saat pandemi COVID-19 dengan studi pada aplikasi PeduliLindungi. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi media literatur khususnya bagi mahasiswa ilmu politik, dan menjadikan bahan pembandingan bagi penelitian-penelitian yang terjadi di masa yang akan datang.

- **Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharap mampu memberikan informasi serta pengetahuan bagi masyarakat mengenai keberadaan otoritarianisme digital pada era pandemi COVID-19, khususnya pada penerapan aplikasi PeduliLindungi, dan diharapkan untuk mampumemberikan masukan kepada pengembangan dari aplikasi *contact tracing* PeduliLindungi.

## **I.5 Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini mudah dipahami secara terstruktur dan memudahkan pemahaman pembaca, maka penulis membagi struktur penelitian menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang permasalahan yang termasuk rumusan masalah, tujuan dibuatnya penelitian, manfaat dari penelitian, serta bagian teknis penelitian.

### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan secara terstruktur mengenai *literature review*, kemudian kerangka teori dan konseptual sebagai kerangka berpikir.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Di dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai teknis penelitian skripsi yang meliputi, jenis penelitian, mengambil sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, jangka waktu dan objek penelitian secara spesifik.

### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana PeduliLindungi menjadi bagian dari otoritarianisme digital pada era pandemi COVID-19.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Di bab ini adalah bagian terakhir di dalam skripsi yang, berisikan kesimpulan dan saran.